



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

KINERJA DAN ANGGARAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

TRIWULAN III
2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu triwulan III tahun 2022.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap triwulan di lingkungan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu yang salah satu tugasnya adalah memantau pelaksanaan kinerja berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan kinerja, menilai hasil pelaksanaannya dan menemukan solusi untuk setiap hambatan dan kendala yang ditemukan.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dituangkan dalam laporan ini meliputi, 1) pengukuran kinerja, 2) realisasi dari target yang telah ditetapkan, 3) realisasi anggaran, 4) hambatan dan kendala, 5) Langkah tindak lanjut, 6) informasi lain terkait pelaksanaan kinerja.

DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu berkomitmen untuk senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran dan kritik membangun baik dari pihak internal maupun eksternal. Akhir kata semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan anggaran di lingkungan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu Triwulan III tahun 2022 ini dapat menjadi bahan perbaikan untuk pencapaian kinerja DPMPTSP ke depan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Putussibau, Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP 19710312 199101 1 001

A. Latar Belakang

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu (DPMPTSP) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran secara berkala sejak tahun 2018.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DPMPTSP menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana kerja tahun 2022 disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Rencana Kerja juga merupakan upaya DPMPTSP untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih tahun 2021-2026 yaitu **“Menuju Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil (HEBAT)”**, dengan tema pembangunan tahun 2022 yaitu **Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, SDM, Ekonomi Unggulan Masyarakat Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Menuju Kapuas Hulu Hebat.**

Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan program, kegiatan serta penggunaan anggaran di lingkungan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu. Melalui monitoring dan evaluasi diharapkan dapat diketahui tingkat pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, untuk selanjutnya dijadikan masukan dan perbaikan pada triwulan berikutnya.

B. Tujuan

Monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran bertujuan untuk :

- 1) Sebagai bentuk komitmen Pimpinan untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja dapat dicapai secara efektif dan terukur;
- 2) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan setiap indikator kinerja yang ditetapkan;
- 3) Untuk mengetahui apakah rencana kerja dan anggaran DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu berjalan efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- 4) Sebagai bentuk pengendalian dan kontrol terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, realisasi anggaran dan proyek yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi kendala, hambatan serta perubahan-perubahan yang

mungkin terjadi dan rencana tindak lanjut sebagai upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

D. Perjanjian Kinerja

Target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2022
1	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif dan Berdaya Saing	Jumlah Dokumen yang Mendukung Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	1 Dokumen
		Persentase Promosi Penanaman Modal	100%
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Bidang Penanaman Modal	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	77
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP	82

E. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana dilakukan dalam melaporkan akuntabilitas kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Formula pengukuran kinerja dengan membandingkan rencana dan realisasi menggunakan penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk memudahkan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran di lingkungan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan yaitu dengan membandingkan target tahun bersangkutan dengan capaian kinerja setiap triwulan, sebagai berikut :

No.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	Meningkatkan investasi Daerah		1. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	72,72 Milyar Rupiah	133,7 Milyar Rupiah	288 Milyar Rupiah	80,867 Milyar Rupiah		691,10	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	25.000.000	24.770.000	99,08
			2. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	339 Milyar Rupiah	357,9 Milyar Rupiah	77 Milyar Rupiah	68.824 Milyar Rupiah		148,59	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.309.000	13.269.834	52,43
		Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	1. Jumlah dokumen yang mendukung iklim penanaman modal yang kondusif	1 dokumen	-	-	-		0,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	379.175.000	130.181.900	34,33
			2. Persentase Promosi Penanaman Modal	100%	-	50	75		75,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	88.518.800	51.237.666	57,88
			3. Persentase Penyelesaian Permasalahan bidang penanaman modal	100%	-	-	100		100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.461.621.024	2.274.566.491	65,71
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi perangkat daerah DPMPTSP		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DPMPTSP	29	-	30,15	-		103,97				

No.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP	Nilai SAKIP	77	-	-	77,34		100,44				
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	82	83,25	83,53	84,78		103,39				
J U M L A H											3.979.623.824	2.494.025.891	62,67

Berdasarkan tabel di atas, Secara umum DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2022-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi daerah sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu. Dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja yang ditetapkan , pencapaian kinerja sasaran DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Jumlah	%
Melebihi/Melampaui Target	5	62,5
Sesuai Target	1	12,5
Tidak mencapai target	-	-
Belum dilakukan pengukuran	2	25

Dari tabel di atas, terdapat 5 indikator yang sudah melampaui target yang ditetapkan atau sebesar 62,5%, sedangkan sisanya belum dapat dilakukan pengukuran karena akan dilakukan di triwulan 4.

a) Tujuan 1 Meningkatkan investasi Daerah dengan indikator :

- 1) Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen yang ditargetkan sebesar 72,72 Milyar Rupiah, terealisasi sebesar 80,867 Milyar Rupiah atau mencapai 691,10% sampai dengan triwulan III.
- 2) Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal yang ditargetkan 339 Milyar Rupiah, terealisasi sebesar 68,824 Milyar Rupiah atau mencapai 148,59% sampai dengan triwulan III.

Capaian indikator kinerja output Tujuan 1 dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja output	Satuan	Anggaran (Rp)		Kinerja		
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Capaian
1	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	Rupiah	25.000.000	24.770.000	72,72 Milyar	80,867 Milyar	111,2%
2	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	Rupiah	379.175.000	130.181.900	339 Milyar	68.824 Milyar	20,3%

- b) Tujuan 2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi perangkat daerah DPMPTSP, dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DPMPTSP , Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi

Birokrasi pada DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu nomor 700/114/LHR/INKAB/IB1 tanggal 13 Juni 2022, adalah sebagai berikut :

No.	ASPEK	BOBOT	NILAI	CAPAIAN
A	PENGUNGKIT	36,30	30,15	83,06%
I	PEMENUHAN	14,60	11,17	76,51%
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	100%
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	100%
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,80	90%
4	Penataan Tatalaksana	1,00	1,00	100%
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,30	92,86%
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	1,00	40%
7	Penguatan Pengawasan	2,20	0,68	30,91%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,39	95,6%
II	REFORM	21,70	18,98	89,12%
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,25	75%
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,00	50%
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	100%
4	Penataan Tatalaksana	3,75	3,75	100%
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,50	75%
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,28	87,5%
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	100%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	100%

Capaian indikator output Tujuan 2 sebagaimana tabel berikut :

No.	Indikator kinerja output	Satuan	Anggaran (Rp)		Kinerja		
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Capaian
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DPMPSTSP	nilai	3.461.621.024	2.274.566.491	29	30,15	103,97

c) Sasaran 1 Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing dengan indikator :

1) Jumlah dokumen yang mendukung iklim penanaman modal yang kondusif,

ditargetkan sebanyak 1 dokumen di tahun 2022, namun belum dapat direalisasikan.

- 2) Persentase promosi penanaman modal, ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2022 ini, dan direncanakan pada triwulan 4 dapat direalisasikan.
- 3) Persentase penyelesaian permasalahan bidang penanaman modal, ditargetkan sebesar 100%.

Capaian indikator output kinerja Sasaran 1 dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

No.	Indikator kinerja output	Satuan	Anggaran (Rp)		Kinerja		
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Capaian
1	Jumlah dokumen yang mendukung iklim penanaman modal yang kondusif	dokumen	0	0	1 dokumen	-	-
2	Persentase promosi penanaman modal	persen	25.309.000	13.269.834	100%	75%	75%
3	Persentase penyelesaian permasalahan bidang penanaman modal	persen	379.175.000	130.181.900	100%	100%	100%

- d) Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP, dengan indikator nilai SAKIP, ditargetkan dengan nilai 77. Dan penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat Kab. Kapuas Hulu, terealisasi dengan nilai 77,34 atau 100,44%. Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

NO	ASPEK	BOBOT	NILAI
A.	PERENCANAAN KINERJA	30	28,60
B.	PENGUKURAN KINERJA	25	16,25
C.	PELAPORAN KINERJA	15	12,22
D.	EVALUASI KINERJA	10	7,18
E.	CAPAIAN KINERJA	20	13,09
	TOTAL	100	77,34

Capaian indikator ouput kinerja Sasaran 2 dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

No.	Indikator kinerja output	Satuan	Anggaran (Rp)		Kinerja		
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP	nilai	3.461.621.024	2.274.566.491	77	77,34	100,44%

- e) Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), ditargetkan baik dengan nilai 82, dan di triwulan III ini terealisasi dengan nilai 84,78. Dengan demikian nilai SKM sudah melampaui target yang ditetapkan.

Capaian indikator output kinerja Sasaran 2 dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

No.	Indikator kinerja output	Satuan	Anggaran (Rp)		Kinerja		
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Capaian
1	Nilai SKM	nilai	88.518.800	51.237.666	82	84,78	103,39%

F. Capaian Pelaksanaan Kegiatan

Adapun capaian pelaksanaan kegiatan selama triwulan III tahun 2022 atas rencana aksi tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagaimana dalam tabel berikut :

PROGRAM	PENGUKURAN KINERJA						% CAPAIAN	DAK /DAU
	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	dokumen	1	1	100	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang benar dan tepat waktu	dokumen	1	1	100	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang benar dan tepat waktu	dokumen	1	1	100	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang benar dan tepat waktu	dokumen	1	1	100	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang benar dan tepat waktu	dokumen	1	0	0	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja yang tepat waktu	laporan	2	0	0	DAU
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rapat evaluasi kinerja dilaksanakan	kali	4	3	75	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan dibayarkan	bulan	12	9	75	DAU
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang yang dibayarkan honor penatausahaan & pengujian keuangan	orang	12	12	100	DAU
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tepat waktu	dokumen	5	4	80	DAU

PROGRAM	PENGUKURAN KINERJA						% CAPAIAN	DAK /DAU
	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu	laporan	1	0	0	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan./Triwulan/ semesteran yang tepat waktu	laporan	3	2	67	DAU
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan & analisis prognosis realisasi anggaran	laporan	1	1	100	DAU
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	dokumen	1	1	100	DAU
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi & laporan BMD	dokumen	1	1	100	DAU
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	dokumen	3	2	67	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen listrik disediakan	item	11	9	82	DAU
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor disediakan	buah	35	30	86	DAU
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan	item	12	9	75	DAU
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	buah	3	3	100	DAU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi & konsultasi	laporan	100	85	85	DAU
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah klasifikasi arsip	klasifikasi	2	2	100	DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Meubel	Jumlah meubel	unit	1	0	0	DAU
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung	paket	1	0	0	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, SDA & listrik dibayarkan	bulan	12	9	75	DAU

PROGRAM	PENGUKURAN KINERJA						% CAPAIAN	DAK /DAU
	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan gaji tenaga kontrak dibayarkan	bulan	12	9	75	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara & dibayarkan pajaknya	unit	10	9	90	DAU
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	unit	20	15	75	DAU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	unit	1	1	100	DAU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan promosi	laporan	1	0	0	DAU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase izin diterbitkan sesuai SOP melalui OSS dan Sicantik	persen	100	100	100	DAU
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau	pelaku usaha	10	9	90	DAU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pembinaan	laporan	2	1	50	DAK
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pengawasan	laporan	2	2	100	DAK
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah publikasi	kali	2	2	100	DAU
			Jumlah laporan SKM	laporan	4	3	75	DAU
			Jumlah laporan PTSP	laporan	4	3	75	DAU
					387	334	86	

Realisasi kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan mencapai 86% di triwulan III ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam rencana aksi. Diharapkan di triwulan berikutnya capaian kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dapat lebih ditingkatkan, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

G. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran selama triwulan III secara rinci per sub kegiatan sebagaimana tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	Sumber Dana
Meningkat nya Akuntabilitas Kinerja DPMTSP	Predikat SAKIP	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.440.000	-	2.320.000	42,65	DAU
				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.775.000	-	3.775.000	100,00	DAU
				3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.775.000	-	3.775.000	100,00	DAU
				4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.775.000	-	3.775.000	100,00	DAU
				5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.775.000	-	1.655.000	43,84	DAU
				6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	5.160.000	-	2.930.000	56,78	DAU
				7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.568.000	-	7.323.000	53,97	DAU
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.209.626.724	-	1.472.757.825	66,65	DAU
				2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	175.402.000	-	86.542.000	49,34	DAU
				3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.820.000	-	12.375.000	47,93	DAU
				4 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.360.000	-	850.000	19,50	DAU

SASARAN STRATEGIS	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	Sumber Dana
				5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.180.000	-	4.525.000	63,02	DAU
				6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.875.000	-	3.875.000	100,00	DAU
		3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD		2.854.000	-	2.854.000	100,00	DAU
			2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2.854.000	-	1.354.000	47,44	DAU
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12.354.000	-	6.504.000	52,65	DAU
		5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		9.156.000	-	7.282.000	79,53	DAU
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		41.527.800	-	30.832.200	74,24	DAU
			3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.731.500	-	8.520.500	97,58	DAU
			4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		6.000.000	-	2.160.000	36,00	DAU
			5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah		185.678.000	-	169.761.157	91,43	DAU

SASARAN STRATEGIS	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	Sumber Dana
				6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	43.320.000	-	8.520.000	19,67	DAU
			6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Pengadaan Meubel	-	34.200.000	-	#DIV/0!	DAU
				2 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	35.000.000	-	-	0,00	
			7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.400.000	-	40.170.199	71,22	DAU
				2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417.644.000	-	317.369.610	75,99	DAU
			8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.340.000	-	40.996.000	83,09	DAU
				2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.030.000	-	7.055.000	33,55	DAU
				3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	-	24.710.000	35,30	DAU
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Jumlah dokumen yang mendukung iklim penanaman modal yang kondusif	1 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	25.309.000	-	13.269.834	52,43	DAU

SASARAN STRATEGIS	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	Sumber Dana
	Persentase Promosi Penanaman Modal	2 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21.414.200	-	21.184.200	98,93	DAU
	Persentase Penyelesaian Permasalahan bidang penanaman modal			2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	3.585.800	-	3.585.800	100,00	DAU
		3 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	226.749.000	-	63.075.400	27,82	DAK
				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	152.426.000	-	67.106.500	44,03	DAK
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	88.518.800	-	51.237.666	57,88	DAU
Total Jumlah					3.945.423.824	34.200.000	2.494.025.891	62,67	

Jumlah anggaran yang mendukung pencapaian sasaran DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu secara ringkas terlihat sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan 3 (Rp.)	% Capaian
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif dan Berdaya Saing	Jumlah Dokumen yang Mendukung Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	-	-	-
	Persentase Promosi Penanaman Modal	25.309.000	13.269.834	52,43
	Persentase Penyelesaian Permasalahan Bidang Penanaman Modal	379.175.000	130.181.900	34,33
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	3.461.621.024	2.274.566.491	65,71
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP	113.518.800	76.007.666	66,96
Jumlah		3.979.623.824	2.494.025.891	62,67

Capaian realisasi anggaran pada triwulan III ini masih kurang dari target yang diinginkan yaitu sebesar 70%. Hal ini dikarenakan adanya rencana *refocussing* anggaran pada tahapan perubahan anggaran tahun 2022. Diharapkan dengan dilakukan *refocusing* anggaran ini realisasi anggaran dan proyek dapat lebih optimal, sehingga capaian kinerja juga dapat maksimal.

H. Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan 1 adalah sebagai berikut :

1. Hambatan dan kendala Sekretariat, antara lain :

- a) Masih terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja, penganggaran dan keuangan, sementara tuntutan akan tersedianya dokumen perencanaan dan

pelaporan capaian kinerja, penganggaran dan keuangan yang tepat waktu semakin tinggi.

- b) Penyusunan dokumen perencanaan berjalan lambat karena perlu penyesuaian dengan dokumen RENSTRA yang baru, disamping harus memenuhi permintaan data dan dokumen terkait dengan evaluasi SAKIP dan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh auditor.

2. Hambatan dan kendala di Bidang Penanaman Modal :

- a) Kegiatan promosi masih terkendala adanya pembatasan kegiatan terkait PPKM covid-19 sehingga belum bisa melaksanakan kegiatan promosi maupun mengikuti *event* pameran investasi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
- b) Indikator tersusunnya draft dokumen perencanaan/pengkajian/ pengusulan penanaman modal daerah belum dapat dilaksanakan di triwulan I karena keterbatasan anggaran yang ada, namun akan ditampung pada penyusunan perubahan anggaran tahun 2022 ini.
- c) Adanya keterlambatan juknis penggunaan dana DAK non fisik pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sehingga menyebabkan penyempurnaan kembali pada rencana anggaran kegiatan. Hal ini berakibat pada terlambatnya beberapa kegiatan pengendalian penanaman modal.

3. Hambatan dan kendala di Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal, antara lain :

- a) Dengan adanya aplikasi OSS yang berbasis resiko (RBA/*risk based approach*), terdapat beberapa perubahan pada aplikasi yang hingga saat ini masih terus dilakukan pemeliharaan dan pembaharuan. Hal ini menjadi kendala untuk pelayanan, sehingga pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya masih harus menunggu perbaikan selesai dilakukan.
- b) Berkenaan dengan kegiatan pengawasan pemenuhan komitmen, kendala yang dihadapi yaitu kesulitan untuk mencari alamat pemohon karena jauh berada dalam kampung dan terkadang sinyal telepon juga terbatas.
- c) Berkaitan dengan adanya rotasi, mutasi dan promosi ASN khususnya di Seksi Data dan Informasi, maka perlu untuk menambah staf yang ada khususnya untuk membantu dalam hal desain.
- d) Adanya upaya pengembangan jaringan OSS RBA sehingga berakibat pada penundaan pelaksanaan kegiatan pelayanan keliling atau bergerak yang direncanakan akan dilaksanakan di triwulan 1 harus ditunda hingga OSS RBA stabil.

I. Catatan Rekomendasi/Saran atas Hambatan dan Kendala

Terhadap hambatan dan kendala yang ada di Sekretariat, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Agar segera dilakukan pembagian tugas dan memilah dokumen mana yang harus diselesaikan lebih dulu sehingga penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dapat diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian juga dengan laporan-laporan capaian kinerja dan keuangan agar segera diselesaikan.

Terhadap hambatan dan kendala di Bidang Penanaman Modal, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Kegiatan promosi penanaman modal memang terkendala karena kurangnya pendanaan yang ada, namun masih dapat dilakukan cara-cara promosi yang lain selain mengikuti pameran promosi secara langsung. Misalnya dengan promosi secara online melalui media sosial serta membagikan brosur tentang potensi dan peluang investasi Kab. Kapuas Hulu di tempat-tempat strategis yang menarik calon investor.
2. Mengenai dokumen usulan/telaahan tentang penyusunan dokumen perencanaan investasi yang mendukung peningkatan iklim investasi daerah dapat disusun meskipun dengan anggaran yang ada. Kemungkinan dapat diusulkan pada perubahan anggaran.
3. Berkenaan dengan keterlambatan petunjuk teknis dana DAK non fisik, agar segera disesuaikan dengan juknis yang ada dan segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sehingga pada triwulan berikutnya sudah ada realisasi kegiatan.

Terhadap hambatan dan kendala di Bidang Penanaman Modal, direkomendasikan sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan adanya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi OSS RBA maka tidak ada yang dapat dilakukan selain memberikan penjelasan sebaik-baiknya kepada pelaku usaha/masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan DPMPTSP.
2. Mengenai kesulitan dalam mencari alamat pelaku usaha yang dilakukan pengawasan, maka dicari bentuk pengawasan lain, misal dengan melakukan wawancara melalui sambungan telepon atau melalui *email* pelaku usaha yang terdaftar dalam sistem OSS.

Tindak lanjut terhadap permasalahan di Triwulan II adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN DI TRIWULAN II	TINDAK LANJUT	KAPAN DISELESAIKAN	PENANGGUNG JAWAB
Masih terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja, penganggaran dan keuangan, sementara tuntutan akan tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja, penganggaran dan keuangan yang tepat waktu semakin tinggi	Akan dimasukkan ke dalam daftar kebutuhan pegawai pada tahun 2023	Tahun 2023	Sekretaris
Kegiatan promosi masih terkendala adanya pembatasan kegiatan terkait PPKM covid-19 sehingga belum bisa melaksanakan kegiatan promosi maupun mengikuti event pameran investasi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.	Melakukan promosi secara daring melalui media sosial atau video, serta menyebarkan brosur tentang potensi dan peluang investasi daerah	Tahun 2022	Kepala Bidang Penanaman Modal
Indikator tersusunnya draft dokumen perencanaan/penkajian/ pengusulan penanaman modal daerah belum dapat dilaksanakan di triwulan I karena keterbatasan anggaran yang ada, namun bila memungkinkan rencana anggaran akan ditampung pada penyusunan perubahan anggaran tahun 2022 ini	Mengusulkan anggaran penyusunan RUPM dengan keluaran berupa rekomendasi teknis / telaahan, pada anggaran perubahan 2022	Tahun 2022	Kepala Bidang Penanaman Modal
Dengan adanya aplikasi OSS yang berbasis resiko risk based approach (RBA), terdapat beberapa perubahan pada aplikasi yang hingga saat ini masih terus dilakukan pemeliharaan dan pembaharuan. Hal ini menjadi kendala untuk pelayanan, sehingga pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya masih harus menunggu perbaikan selesai dilakukan.	Memberikan penjelasan secara memadai kepada pelaku usaha sambil menunggu perbaikan yang dilakukan	Tahun 2022	Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal
Berkenaan dengan kegiatan pengawasan pemenuhan komitmen, kendala yang dihadapi yaitu kesulitan untuk mencari alamat pemohon karena jauh berada dalam kampung dan terkadang sinyal telepon juga terbatas.	Kegiatan pengawasan juga dilakukan secara online, melalui sambungan telepon atau email, serta melalui camata tau lurah	Tahun 2022	Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal
Adanya gangguan SiCantik menyebabkan untuk sementara waktu tidak dapat memberikan pelayanan	Pelayanan melalui SiCantik akan dilayani kembali setelah selesai pemeliharaan	Tahun 2022	Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal
Berkaitan dengan adanya rotasi, mutasi dan promosi ASN khususnya di Seksi Data dan Informasi, maka perlu untuk menambah staf yang ada khususnya untuk membantu dalam hal pengolahan data dan desain.	Akan dimasukkan ke dalam daftar kebutuhan pegawai pada tahun 2023	Tahun 2023	Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal

J. Kesimpulan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022 DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2022 dan juga merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) di lingkungan DPMPTSP

Kab. Kapuas Hulu tahun 2022. Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Diharapkan laporan ini dapat menggambarkan kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai di Triwulan III baik berupa kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, maupun kinerja sasaran beserta analisis kinerja yang dilaporkan.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau Kode Pos 78716 Telp./Fax. (0567) 21022

Laman : dpmptsp.kapuashulu.go.id

Pos-e : dpmptsp@kapuashulukab.go.id

NOTULEN

Hari/tanggal : 18 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Kadis DPMPTSP
Pimpinan rapat : Kepala Dinas PMPTSP
Notulis : Noviana Estiningsih, SE.
Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan
Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2022

-
1. Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di ruang kerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dihadiri oleh Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Fungsional Tertentu DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.
 2. Adapun hasil rapat dapat dilaporkan sebagai berikut :
 - A. Rapat dibuka dengan pengantar dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, tentang capaian sasaran kegiatan yang telah direalisasikan selama triwulan III, sebagai berikut :
 - 1) Di triwulan III tahun 2022 ini DPMPTSP telah dapat mencapai Sebagian besar dari 8 indikator utama DPMPTSP. Semoga di triwulan IV dapat 100% mencapai target kinerja sesuai yang direncanakan.
 - 2) Berkenaan dengan pelaksanaan tahun pertama Renstra 2022-2026 agar segera melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan pejabat-pejabat yang telah beralih ke jabatan fungsional juga harus segera menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya yang baru.
 - B. Selanjutnya adalah pemaparan Bapak Piet Soemaryoto, S.Hut.,M.Si selaku

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa :

- a) Dari sasaran peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, untuk indikator kinerja nilai LAKIP OPD tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Inperktorat Kab. Kapuas Hulu, nilai SAKIP DPMPTSP adalah 77,34 poin.
- b) Sedangkan indikator penyerapan anggaran dinas terealisasi sebesar Rp. Rp. 2.494.025.891,00 (*dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*) . Penyerapan anggaran triwulan ini sebesar 62,67%. Diharapkan di triwulan berikutnya penyerapan anggaran dapat lebih dioptimalkan.
- c) Sasaran meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu telah dijawabnya seluruh pertanyaan dan bukti-bukti yang terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2021 telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya.
- d) Sedangkan untuk indikator nilai pelayanan publik, DPMPTSP telah dapat meraih angka kepatuhan yang baik (warna hijau), dengan nilai rata-rata 95,68. Diharapkan tahun 2022 DPMPTSP dapat memperoleh nilai sempurna untuk kepatuhan pelayanan publik, yang penilaiannya dilakukan oleh Ombudsman RI.
- e) Untuk sasaran sarana prasarana aparatur yang dimiliki dalam kondisi baik terrealisasi sebesar 90%. Perlengkapan sarana prasarana setelah pindah ke gedung baru telah dilengkapi, semoga dapat memperoleh hasil yang lebih baik di tahun 2022.
- f) Adapun kendala yang dihadapi Sekretariat adalah :
 - Masih terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja, penganggaran dan keuangan, sementara tuntutan akan tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja, penganggaran dan keuangan yang tepat waktu semakin tinggi.

C. Dari Bapak Yeddy Surahman, S.STP.,M.Ec.Dev., selaku Kepala Bidang Penanaman Modal disampaikan laporan sebagai berikut :

- a. Sasaran tersedianya dokumen perencanaan penanaman modal daerah, dengan indikator kinerja persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun belum ada realisasi. Mengingat keterbatasan alokasi dana yang ada, di tahun ini akan merumuskan usulan penyusunan dokumen perencanaan penanaman modal berupa telaahan maupun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan.
- b. Pada sasaran meningkatnya promosi dan kerjasama investasi dengan indikator kinerja jumlah minat investor akan dilaporkan di triwulan berikutnya.
- c. Sedangkan pada sasaran meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal dengan indikator kinerja jumlah perusahaan/pelaku usaha yang menyampaikan LKPM telah terealisasi sebanyak 43 perusahaan/pelaku usaha. Artinya, indikator ini telah mencapai 243% dari target yang ditetapkan. Sehingga sampai dengan triwulan III terdapat 122 perusahaan/pelaku usaha yang menyampaikan LKPM tepat waktu.
- d. Realisasi investasi di triwulan III berdasarkan LKPM yang masuk yaitu sebesar Rp.68,824 Milyar. Nilai ini merupakan nilai realisasi sementara, sedangkan hasil rilis resmi oleh BKPM RI (Kementerian Investasi) belum diketahui. Adapun target nilai investasi dari Kementrian Investasi untuk Kab. Kapuas Hulu adalah sebesar Rp. 701,09 Milyar. Di triwulan III ini realisasi mencapai 71,88%.
- e. Pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan penanaman modal telah melaksanakan rapat koordinasi tentang fasilitasi kerjasama investasi antara investor Nasional (Alfamart) dengan UMKM daerah. Diharapkan kegiatan ini berdampak baik bagi perkembangan UMKM daerah.
- f. Kendala yang dihadapi Bidang Penanaman Modal adalah :
 - Kegiatan promosi secara *offline* atau mengikuti *event* promosi investasi masih menyesuaikan dengan normal baru covid-19 sehingga belum bisa melaksanakan kegiatan promosi maupun mengikuti *event* pameran investasi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

- Indikator tersusunnya draft dokumen perencanaan/pengkajian/pengusulan penanaman modal daerah belum dapat dilaksanakan di akhir tahun karena keterbatasan anggaran yang ada, namun bila memungkinkan rencana anggaran akan ditampung pada penyusunan perubahan anggaran tahun 2022 ini.

D. Dari Bapak Ibnu Hajar S.E.M.Si selaku kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal disampaikan laporan sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan dengan indikator kinerja pemantauan pemenuhan komitmen kepada pelaku usaha dengan target 100%, telah terealisasi sebesar 75%.
- b. Untuk indikator persentase perizinan yang diterbitkan sesuai SOP terealisasi 100%. Semua izin yang diterbitkan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang telah ditetapkan.
- c. Sedangkan untuk indikator persentase pengelolaan data dan sistem informasi juga telah terealisasi 100%. Pemenuhan dan pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu telah dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan.
- d. Sasaran survei kepuasan masyarakat terrealisasi sebesar 84,78 (baik). Adapun nilai SKM ini juga telah di *publish* atau dipublikasikan secara terbuka dengan menempelkan di ruang tunggu pelayanan DPMPTSP dan juga ditampilkan dalam laman resmi DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.
- e. Izin tervalidasi atau yang sudah memenuhi komitmen yang masuk melalui OSS sebanyak 667 izin, dengan nilai investasi sebesar Rp. 80,87 Milyar. Sedangkan izin SiCantik yang diterbitkan sebanyak 148 izin. Sehingga total ijin diterbitkan sebanyak 815 izin.
- f. Selain capaian sebagaimana disebutkan di atas, berikut disampaikan pula kendala yang dialami oleh *front office* selama triwulan III ini, yaitu :
 - Dengan adanya aplikasi OSS yang berbasis resiko *risk based approach* (RBA), terdapat beberapa perubahan pada aplikasi yang hingga saat ini masih terus dilakukan pemeliharaan dan pembaharuan. Hal ini menjadi kendala untuk pelayanan.

- Berkenaan dengan kegiatan pengawasan pemenuhan komitmen, kendala yang dihadapi yaitu kesulitan untuk mencari alamat pemohon karena jauh berada dalam kampung dan terkadang sinyal telepon juga terbatas.
- Berkaitan dengan adanya rotasi, mutasi dan promosi ASN khususnya di Seksi Data dan Informasi, maka perlu untuk menambah staf yang ada khususnya untuk membantu dalam pengolahan data.

3) Dari data yang telah dipaparkan di atas, pada triwulan III ini diperoleh hasil realisasi indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu sebagai berikut :

- a. Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Predikat SAKIP yang ditargetkan “BB” telah tercapai dengan nilai BB (77,34 poin), atau telah terealisasi 100%.
- b. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator kinerja Nilai SKM yang ditargetkan 80 (Baik). Di triwulan II terealisasi dengan nilai 84,78 (Baik) dengan jumlah responden sebanyak 40 orang. Nilai SKM ini telah dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses langsung oleh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Sasaran meningkatkan realisasi investasi di daerah dengan indikator kinerja nilai realisasi investasi dengan target sebesar Rp. 398 Milyar, sampai dengan triwulan III telah terealisasi sebesar Rp. 1 Trilyun atau sebesar 252,92%. Angka realisasi investasi ini berasal dari penyampaian LKPM sebesar Rp. 503,97 Milyar dan pengajuan izin melalui OSS yang sudah tervalidasi sebesar Rp.502,6 Milyar. Realisasi investasi yang sangat besar ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat pelaku usaha untuk memperoleh perizinan usaha bagi kegiatan usahanya.

4) Evaluasi Kepala Dinas terhadap capaian kinerja dan anggaran :

Hal-hal yang menjadi perhatian untuk Sekretariat :

- a) Agar segera membenahi dan meningkatkan tingkat kehadiran (ASN dan tenaga kontrak) di lingkungan DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu, kegiatan apel pagi dan

sore tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak bagi pegawai yang bekerja di kantor.

- b) Untuk penyampaian SKP bulanan aparatur dimaksudkan untuk mengukur kinerja setiap aparatur dan sebagai acuan dalam menentukan jumlah tambahan penghasilan.
- c) Agar segera menyelesaikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tepat waktu dan menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian juga dengan laporan-laporan capaian kinerja dan keuangan agar segera diselesaikan.
- d) Untuk kegiatan kearsipan dinas diarahkan untuk menjadi handal dan dapat diandalkan, mengingat penilaian awal terhadap arsip DPMPTSP masih sangat jauh dari yang diharapkan. Agar dapat dimintakan saran serta rekomendasi perbaikan apa saja yang diperlukan sehingga kegiatan kearsipan dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.
- e) Berkaitan dengan arsip DPMPTSP bila memungkinkan bisa disimpan dalam bentuk digital termasuk buku tamu elektronik. Bila dimungkinkan agar membuat aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk membantu dalam proses digitalisasi kearsipan DPMPTSP.
- f) Terhadap hasil evaluasi penilaian SAKIP tahun 2021 terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, agar segera disiapkan langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan OPD sehingga evaluasi tahun berikutnya dapat lebih baik lagi. Langkah tindak lanjut ini akan didiskusikan secara terpisah.
- g) Selanjutnya, agar masing-masing bidang menyusun usulan perubahan anggaran tahun 2022, sehingga pada saat diminta untuk menyusun sudah tersedia, karena operator perlu waktu untuk proses penginputan.

Catatan untuk Bidang Pelayanan dan Informasi :

- a) Dengan telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) pastinya menyebabkan beberapa perubahan terhadap pelayanan perizinan DPMPTSP. Agar selalu mengikuti segala perubahan yang mungkin terjadi. Namun segala

perubahan itu jangan menjadikan DPMPTSP semakin mundur tapi sebaliknya menjadikan DPMPTSP semakin terdepan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pelaku usaha.

- b) Agar dilakukan pendekatan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh NIB tetapi tidak memenuhi komitmen. Upayakan dilakukan edukasi dan pembinaan melalui *front office* kepada pelaku usaha untuk segera memenuhi komitmen, karena akan berkaitan dengan realisasi investasi di daerah.
- c) Agar dapat direncanakan kegiatan pelayanan keliling sehingga memungkinkan untuk dilakukan pendekatan terhadap pelaku usaha di kecamatan tentang pemenuhan komitmen perizinan berusaha sehingga realisasi perizinan melalui OSS yang tervalidasi dapat ditingkatkan, sekaligus dapat memberikan pelayanan dan pengetahuan kepada masyarakat yang akan merintis usahanya.
- d) Dengan telah disahkannya standar pelayanan DPMPTSP agar segera di publikasikan baik melalui laman resmi DPMPTSP, di ruang publik atau pelayanan, maupun melalui forum sosialisasi apabila kondisi telah memungkinkan.
- e) Berkenaan dengan konten-konten yang akan ditampilkan dalam laman resmi DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, agar dirancang dan disusun konten apa saja yang akan dipublikasikan, sehingga tampilan laman lebih informatif.
- f) Terkait kendala yang dialami di Bidang Pelayanan dan Informasi :
 - Adanya perubahan penanganan pengaduan kendala teknis OSS RBA menyebabkan perlambatan layanan pengaduan apabila terjadi kendala teknis pada aplikasi OSS RBA. Hal ini sudah disampaikan ke *help desk* BKPM sehingga diharapkan pengaduan teknis dapat dilayani dengan cepat.
 - Dengan penerapan OSS RBA ini agar setiap aparatur bidang pelayanan perizinan agar dapat mengikuti bimbingan dan pelatihan teknis aplikasi baru ini, agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelaku usaha.

Hal-hal yang menjadi catatan Bidang Penanaman Modal :

- a) Angka kepatuhan perusahaan terhadap penyampaian LKPM agar ditingkatkan lagi dan lebih menggiatkan LKPM. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap angka realisasi investasi di Kab. Kapuas Hulu.

- b) Berkaitan dengan kepatuhan perusahaan menyampaikan LKPM agar disusun rencana untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap perusahaan, penerapan sanksi administratif dan pemberian peringatan, serta melakukan pembinaan secara berkala. Diharapkan dengan Langkah-langkah yang sudah diupayakan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaporkan perkembangan kegiatan penanaman modalnya.
- c) Agar menyusun inventarisasi perusahaan-perusahaan perkebunan yang memiliki ijin lokasi, sehingga dapat diketahui perusahaan mana saja yang masa berlaku ijin lokasinya akan berakhir dan dapat dilakukan pendekatan atau pemberitahuan agar dapat diarahkan untuk mengurus ijin usaha perkebunannya. Hal ini perlu dilakukan supaya perusahaan-perusahaan tersebut lebih tertib administrasi dan memiliki perijinan.
- d) Apabila kondisi memungkinkan agar dapat menyusun rancangan strategi promosi investasi yang akan diikuti di tahun 2023, mengingat dana untuk kegiatan yang terbatas.
- e) Grup perusahaan Alfamart di wilayah Putussibau setuju untuk memberikan ruang bagi produk UMKM lokal. Hal ini merupakan kabar baik bagi pengusaha UMKM di Putussibau, untuk itu agar dapat dijajaki produk lokal apa saja yang dapat direkomendasikan untuk kerjasama ini.

Mengetahui Pimpinan Rapat :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 19710312 199101 1 001

Notulis,

NOVIANA ESTININGSIH, SE
Penata Tk. I
NIP 19771107 200604 2 007

PENGUKURAN KINERJA KEPALA DINAS TRIWULAN III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan investasi Daerah		1.Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	72,72 Milyar Rupiah	133,7 Milyar Rupiah	288 Milyar Rupiah	80,867 Milyar Rupiah		691.10	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	25,000,000	24,770,000	99.08
			2. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	339 Milyar Rupiah	357,9 Milyar Rupiah	77 Milyar Rupiah	68.824 Milyar Rupiah		148.59	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25,309,000	13,269,834	52.43
		Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	1. Jumlah dokumen yang mendukung iklim penanaman modal yang kondusif	1 dokumen	-	-			0.00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	379,175,000	130,181,900	34.33
			2. Persentase Promosi Penanaman Modal	100%	-	50	75		75.00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	88,518,800	51,237,666	57.88
			3. Persentase Penyelesaian Permasalahan bidang penanaman modal	100%	-	-	100		100.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,461,621,024	2,274,566,491	65.71
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi perangkat daerah DPMPPTSP		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DPMPPTSP	29	-	30.15	-		103.97				
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP	Nilai SAKIP	77	-	-	77.34		100.44				
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPPTSP Kab. Kapuas Hulu	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	82	83.25	83.53	84.78		103.39				
J U M L A H											3,979,623,824	2,494,025,891	62.67

Keterangan :

* Realisasi investasi :

-Penyampaian LKPM
 -Izin tervalidasi

Rp. 68,824,015,972.00 (nilai sementara)
 Rp. 80,866,764,002.00
 Rp. 149,690,779,974.00

* Realisasi Anggaran :

-Gaji/TPP
 -Belanja Operasi (Program/Kegiatan)
 Jumlah

Rp. 1,472,757,825.00 37.01 %
 Rp. 1,021,268,066.00 25.66 %
 Rp. 2,494,025,891.00 62.67 %

Putussibau, Oktober 2022
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710312 199101 1 001

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIS DINAS TRIWULAN III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai LAKIP OPD	77	-	-	77.34		100.44	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,268,000	25,553,000	65.07
		Penyerapan anggaran dinas	96%	12.33	37.22	62.67		65.28	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,426,263,724	1,580,924,825	65.16
2	Meningkatnya kinerja Dinas PMPTSP	Tindaklanjut hasil pemeriksaan	100%	100	100%	100%		100				
		Nilai evaluasi pelayanan publik	Baik	Baik	Baik	Baik		100	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88,518,800	51,237,666	57.88
3	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	80%	90%	90%		100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140,370,000	72,761,000	51.84
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,354,000	6,504,000	52.65
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	294,413,300	227,075,857	77.13

Putussibau, Oktober 2022
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu


PIET SOEMARYOTO, S.Hut., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19790319 200301 1 001

PENGUKURAN KINERJA SUB KOORDINATOR SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN TRIWULAN III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan	2 dok	2 dok	-	-		100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,440,000	2,320,000	42.65
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2 dok	1 dok	-	1 dok		100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	5,160,000	2,930,000	56.78
		Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan	1 dok RKA	1 dok	-	-		100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,775,000	3,775,000	100.00
			1 dok perubahan RKA	-	1 dok	-		100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,775,000	3,775,000	100.00
			1 dok DPA	1 dok	-	-		100	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,775,000	3,775,000	100.00
			1 dok perubahan DPA	-	1 dok	-		100	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,775,000	1,655,000	43.84
			1 dok laporan keuangan	-	-	-		0	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,360,000	-	0.00
2	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD	Prosentase dokumen pertanggung jawaban yang dikelola	100%	25%	50%	75%		75	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7,180,000	4,525,000	63.02
									Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25,820,000	12,375,000	47.93
									Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,875,000	3,875,000	100.00

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas	#REF!	4 kali	1 kali	1 kali	1 kali		75	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,568,000	7,323,000	53.97
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,209,626,724	1,472,757,825	66.65
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175,402,000	86,542,000	49.34

Putussibau, Oktober 2022

Sub Koordinator
Sub Bagian Program dan Keuangan,

NOVIANA ESTININGSIH, SE.

Penata Tk. I

NIP. 19771107 200604 2 007

PENGUKURAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR TRIWULAN III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang menjadi tupoksinya	Prosentase terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang menjadi tupoksinya	100%	70%	80%	90%		90	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,527,800	30,832,200	74.24
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417,644,000	317,369,610	75.99
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,731,500	8,520,500	97.58
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,000,000	2,160,000	36.00
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185,678,000	169,761,157	91.43
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,400,000	40,170,199	71.22
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,030,000	7,055,000	33.55
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70,000,000	24,710,000	35.30
2	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara	100%	30%	50%	100%		100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49,340,000	40,996,000	83.09
									Pengadaan Meubel	34,200,000	-	0.00
									Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	35,000,000	-	0.00

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Tersusnya dokumen kepegawai dan aset	Jumlah dokumen kepegawaian dan aset yang harus ada	1 dok rekap SKP	1 dok	1 dok	1 dok		100	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,354,000	6,504,000	52.65
			1 dok rekap absensi	1 dok	1 dok	1 dok		100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,854,000	2,854,000	100.00
			1 dok rekon aset	-	1 dok	-		100	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,854,000	1,354,000	47.44
4	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen arsip dinamis yang dikelola	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok		100	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	49,150,000	8,520,000	17.33

Putussibau, Oktober 2022
Kepala Sub Bagian Umum & Aparatur,

BIBIANTO, S.E

Penata Tk. I

NIP. 19740707 199303 1 001

PENGUKURAN KINERJA KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL TRIWULAN III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	#REF!	#REF!	100%	-	-			0				
2	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	Jumlah minat investor dalam 1 tahun	1 minat	-	-	1 minat		100	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25,309,000	13,269,834	52.43
3	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	50 perusahaan	45 perusahaan	34 perusahaan	43 perusahaan		244	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	379,175,000	130,181,900	34.33

Putussibau, Oktober 2022
Kepala Bidang Penanaman Modal,



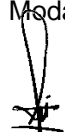
YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev

Penata Tingkat I
NIP. 19841212 200312 1 001

PENGUKURAN KINERJA SUB KOORDINATOR SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
TRIWULAN III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersusunnya draft dokumen perencanaan/ pengkajian / pengusulan penanaman modal daerah	Jumlah draft dokumen perencanaan /pengkajian /usulan penanaman modal	1 dok	-	-	-	-	0	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota\	25,309,000	13,269,834	52.43
2	Terlaksananya promosi penanaman modal	Jumlah laporan promosi penanaman modal	1 laporan	-	-	-	-	0				

Putussibau, Oktober 2022
Sub Koordinator Seksi Prencanaan
dan Pengembangan Penanaman
Modal


ZULFIKAR, S.E.
Penata Muda Tk. I
NIP. 19890118 201101 1 002

**PENGUKURAN KINERJA SUB KOORDINATOR SEKSI PENGENDALIAN TRIWULAN III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengendalian PM	2 laporan	-	1 laporan	-	-	50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	226,749,000	63,075,400	27.82
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	152,426,000	67,106,500	44.03

Putussibau, Oktober 2022
Sub Koordinator Seksi
Pengendalian Penanaman Modal,

ZULFIKAR, S.E.

Penata Muda Tk. I

NIP. 19890118 201101 1 002

PENGUKURAN KINERJA KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN INFORMASI TRIWULAN III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase Pemantauan pemenuhan komitmen pelaku usaha	100%	25%	50%	75%		75	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	25,000,000	24,770,000	99.08
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%		100	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	88,518,800	51,237,666	57.88
		Persentase pengelolaan data dan sistem informasi	100%	100%	100%	100%		100				

Putussibau, Oktober 2022
Kepala Bidang Pelayanan dan
Informasi Penanaman Modal,



IBNU HAJAR, SE., M.Si.

Pembina

NIP 19710821 199303 1 006

PENGUKURAN KINERJA SUB KOORDINATOR SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TRIWULAN III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlayannya permohonan perizinan dan non perizinan	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%		100	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21,414,200	21,184,200	98.93
2	Terlaksanannya pengawasan terhadap pemegang izin usaha di Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah pemegang izin yang dilakukan pengawasan perizinan dan non perizinan	10 pemegang izin	4	5	9		180	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	3,585,800	3,585,800	100.00

Putussibau, Oktober 2022
Sub Koordinator
Seksi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan,


SUNDARI, S.A.P.

Penata Tk. I
NIP. 19790113 199903 2 001

PENGUKURAN KINERJA SUB KOORDINATOR SEKSI DATA DAN INFORMASI TRIWULAN III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA				% CAPAIAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
				TW I	TW II	TW III	TW IV			APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Jumlah laporan permintaan data dan informasi penanaman modal	1 laporan	-	-	-		0	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	88,518,800	51,237,666	57.88
2	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan PTSP	Jumlah laporan PTSP	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		75				
3	Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan SKM	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		75				
4	Terlaksananya pelayanan pengaduan	Persentase pengaduan yang terlayani	100%	100	100	100		100				

Putussibau, Oktober 2022
Sub Koordinator Seksi Data dan Informasi,



ELYA SUMARTIK, S.P.M.Pd.

Penata Tk. I

NIP 19791029 201001 2 006

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	PROGRAM	PENGUKURAN KINERJA						% CAPAIAN	DAK /DAU
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	dokumen	1	1	100	DAU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang benar dan tepat waktu	dokumen	1	1	100	DAU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang benar dan tepat	dokumen	1	1	100	DAU
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang benar dan tepat waktu	dokumen	1	1	100	DAU
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang benar dan tepat waktu	dokumen	1	0	0	DAU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja yang tepat waktu	laporan	2	0	0	DAU
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rapat evaluasi kinerja	kali	4	3	75	DAU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan dibayarkan	bulan	12	9	75	DAU

No.	PROGRAM	PENGUKURAN KINERJA						% CAPAIAN	DAK /DAU
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang yang dibayarkan honor penatausahaan & pengujian keuangan	orang	12	12	100	DAU
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tepat waktu	dokumen	5	4	80	DAU
			Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tepat	laporan	1	0	0	DAU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan./Triwulan/ semesteran yang tepat waktu	laporan	3	2	67	DAU
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan & analisis prognosis realisasi anggaran	laporan	1	1	100	DAU
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan BMD	dokumen	1	1	100	DAU
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi & laporan BMD	dokumen	1	1	100	DAU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	dokumen	3	2	67	DAU

No.	PROGRAM	PENGUKURAN KINERJA						% CAPAIAN	DAK /DAU
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen listrik disediakan	item	11	9	82	DAU
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor disediakan	buah	35	30	86	DAU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan	item	12	9	75	DAU
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	buah	3	3	100	DAU
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi & konsultasi	laporan	100	85	85	DAU
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah klasifikasi arsip	klasifikasi	2	2	100	DAU
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Meubel	Jumlah meubel	unit	1	0	0	DAU
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung	paket	1	0	0	DAU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, SDA & listrik dibayarkan	bulan	12	9	75	DAU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan gaji tenaga kontrak dibayarkan	bulan	12	9	75	DAU

No.	PROGRAM	PENGUKURAN KINERJA						% CAPAIAN	DAK /DAU
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara & dibayarkan pajaknya	unit	10	9	90	DAU
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	unit	20	15	75	DAU
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	unit	1	1	100	DAU
2	PROGRAM PROMOSI	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan promosi	laporan	1	0	0	DAU
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Persentase izin diterbitkan sesuai SOP melalui OSS dan Sicantik	persen	100	100	100	DAU
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau	pelaku usaha	10	9	90	DAU
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pembinaan	laporan	2	1	50	DAK

No.	PROGRAM	PENGUKURAN KINERJA						% CAPAIAN	DAK /DAU
		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
	PENANAMAN MODAL	yang menjaui Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pengawasan	laporan	2	2	100	DAK
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah publikasi	kali	2	2	100	DAU
				Jumlah laporan SKM	laporan	4	3	75	DAU
				Jumlah laporan PTSP	laporan	4	3	75	DAU
						387	334	86	

Putussibau, 18 Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten



DIDIK WIDYANTO, S.Sos., M.AP.

Pembina Utama Muda
NIP 19710312 199101 1 001

REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	Sumber Dana	ALASAN PENYERAPAN <= 60%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMDTSP	Predikat SAKIP	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,440,000	-	2,320,000	42.65	DAU	ada sebagian belanja yg belum terbuka
				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,775,000	-	3,775,000	100.00	DAU	
				3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,775,000	-	3,775,000	100.00	DAU	
				4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,775,000	-	3,775,000	100.00	DAU	
				5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,775,000	-	1,655,000	43.84	DAU	masih ada belanja yang belum terbuka
				6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	5,160,000	-	2,930,000	56.78	DAU	dokumen laporan capaian kinerja baru akan disusun menjelang akhir periode
				7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,568,000	-	7,323,000	53.97	DAU	evaluasi kinerja tw 3 & 4 belum terlaksana
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,209,626,724	-	1,472,757,825	66.65	DAU	LS
				2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175,402,000	-	86,542,000	49.34	DAU	honor penatausaha keuangan tw 2 belum dicairkan
				3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25,820,000	-	12,375,000	47.93	DAU	pelaksanaan akuntansi tw2 belum terbuka
				4 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4,360,000	-	850,000	19.50	DAU	laporan keuangan baru akan disusun menjelang akhir periode


SASARAN STRATEGIS	Indikator	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	Sumber Dana	ALASAN PENYERAPAN <= 60%	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	
						5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7,180,000	-	4,525,000	63.02	DAU	ada sebagian belanja yg belum terbuku
						6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,875,000	-	3,875,000	100.00	DAU	
				3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,854,000	-	2,854,000	100.00	DAU	
						2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,854,000	-	1,354,000	47.44	DAU	ada sebagian belanja yg belum terbuku
				4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,354,000	-	6,504,000	52.65	DAU	ada pergeseran anggaran
				5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,156,000	-	7,282,000	79.53	DAU	
						2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,527,800	-	30,832,200	74.24	DAU	
						3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8,731,500	-	8,520,500	97.58	DAU	
						4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,000,000	-	2,160,000	36.00	DAU	pembayaran tw2 belum ditagihkan oleh agen
						5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	185,678,000	-	169,761,157	91.43	DAU	
						6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	43,320,000	-	8,520,000	19.67	DAU	ada pergeseran anggaran

SASARAN STRATEGIS	Indikator	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN		BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	Sumber Dana	ALASAN PENYERAPAN <= 60%				
1	2	3		4		5		6	7	8	9	10	11				
				6	Pengadaan Barang Milik Daerah	1	Pengadaan Meubel	-	34,200,000	-	#DIV/0!	DAU	ada pergeseran anggaran				
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	35,000,000	-	-	0.00		ada pergeseran anggaran				
				7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,400,000	-	40,170,199	71.22	DAU					
						2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	417,644,000	-	317,369,610	75.99	DAU					
				8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49,340,000	-	40,996,000	83.09	DAU					
						2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,030,000	-	7,055,000	33.55	DAU	ada pergeseran anggaran				
						3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70,000,000	-	24,710,000	35.30	DAU	ada pergeseran anggaran				
				Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Jumlah dokumen yang mendukung iklim penanaman modal yang kondusif	1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	25,309,000	-	13,269,834	52.43	DAU	ada pergeseran anggaran
					Persentase Promosi Penanaman Modal	2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	21,414,200	-	21,184,200	98.93	DAU	

SASARAN STRATEGIS	Indikator	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	Sumber Dana	ALASAN PENYERAPAN <= 60%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Penyelesaian Permasalahan bidang penanaman modal		Daerah Kabupaten/Kota	2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	3,585,800	-	3,585,800	100.00	DAU	
		3 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	226,749,000	-	63,075,400	27.82	DAK	1. juknis baru diterima pada akhir januari 2022, sehingga harus merubah DPA menyesuaikan dengan juknis 2. kegiatan sosialisasi oss di tw 3 belum dibukukan
				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	152,426,000	-	67,106,500	44.03	DAK	1. juknis baru diterima pada akhir januari 2022, sehingga harus merubah DPA menyesuaikan dengan juknis 2. kegiatan pengawasan di tw 3 belum dibukukan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik DPMPPTSP Kab. Kapuas Hulu	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	88,518,800	-	51,237,666	57.88	DAU	ada pergeseran anggaran
Total Jumlah					3,945,423,824	34,200,000	2,494,025,891	62.67		

Putussibau, Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WULIYANTO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 19710312 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Antasari No. 04 Putussibau Kode Pos 78716 Telp./Fax. (0567) 21022
Web : dpmptsp.kapuashulukab.go.id
Email : dpmptsp@kapuashulukab.go.id
PUTUSSIBAU

Putussibau, 17 November
2022

Kepada :

Nomor : 570/ **389** /DPM/SET

Yth.

Sifat : Penting

Lampiran : -

di -

Perihal : Undangan monitoring dan evaluasi
capaian kinerja dan realisasi
anggaran triwulan III tahun 2022

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran triwulan III tahun 2022, bersama ini dimohon kehadiran Saudara/i pada kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022

Waktu : 09.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Kerja Kepala Dinas Penanaman Modal &
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara menyiapkan data dan bahan evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing seksi dan bidang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu



DIDIK WIDIYANTO, S. Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19710312 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78716 Telp./Fax. (0567) 21022

Laman : www.dpmptsp.kapuashulukab.go.id

Pos-e : dpmptsp@kapuashulukab.go.id






PUTUSSIBAU



DAFTAR HADIR

AGENDA : Rapat Monitoring & Evaluasi Capaian Kinerja & Realisasi
Anggaran Triwulan III Tahun 2022

HARI / TANGGAL : Selasa, 18 Oktober 2022

TEMPAT : Ruang Kadis DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP.	Kepala Dinas	
2.	NOVIANA ESTININGSIH, SE.	Sub Koordinator Sub Bagian Program dan Keuangan,	
3.	BIBIANTO, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum & Aparatur,	
4.	SUNDARI, S.AP.	Sub Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,	
5.	ZULFIKAR, S.E.	Sub Koordinator Seksi Pengendalian Penanaman Modal,	

6.	ELYA SUMARTIK, S.P.M.Pd.	Sub koordinator Seksi Data dan Informasi	
7.	ARI TIRAHATI	Bendahara	

Putussibau, 18 Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

